



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan rencana strategis Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.

13. Arah...

13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.

(4) Tahapan...

- (4) Tahapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko; dan
 - e. pengendalian Risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan Program dan Kegiatan;
 - c. penetapan target Kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.

NIP. 197701042006041002

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 47

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam pasal 272 ayat (1) bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD.

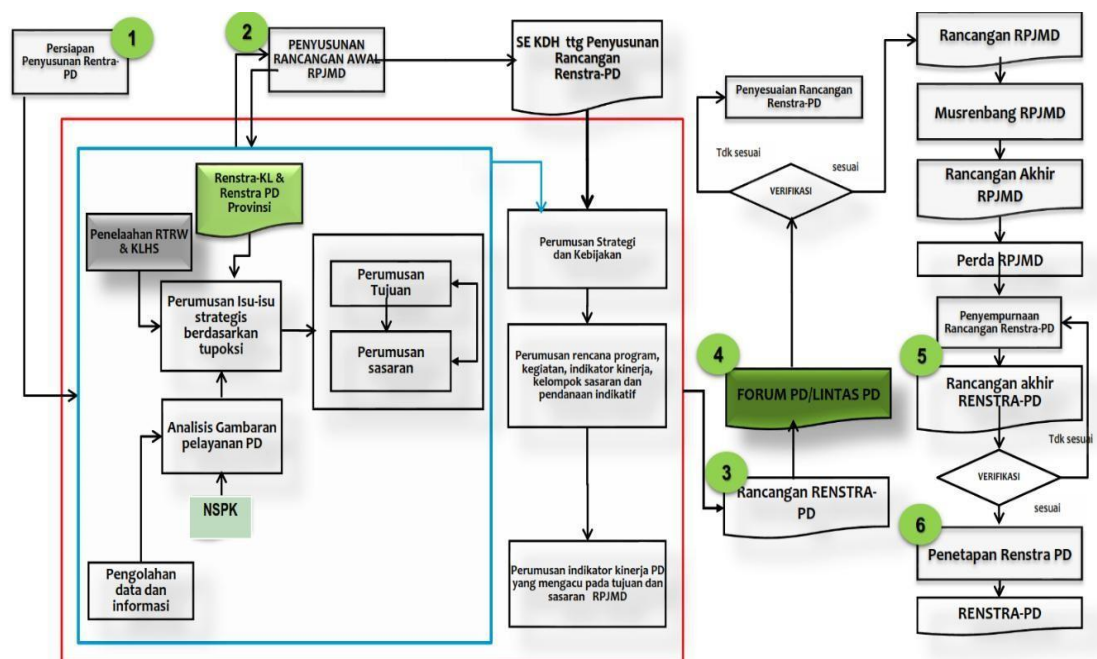
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjabarkan arah kebijakan RPJMD ke dalam strategi, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang fungsinya sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan pengukuran kinerja. Tata cara penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Adapun tata cara dan tahapan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 1.1
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA DINAS
PPKBP3A

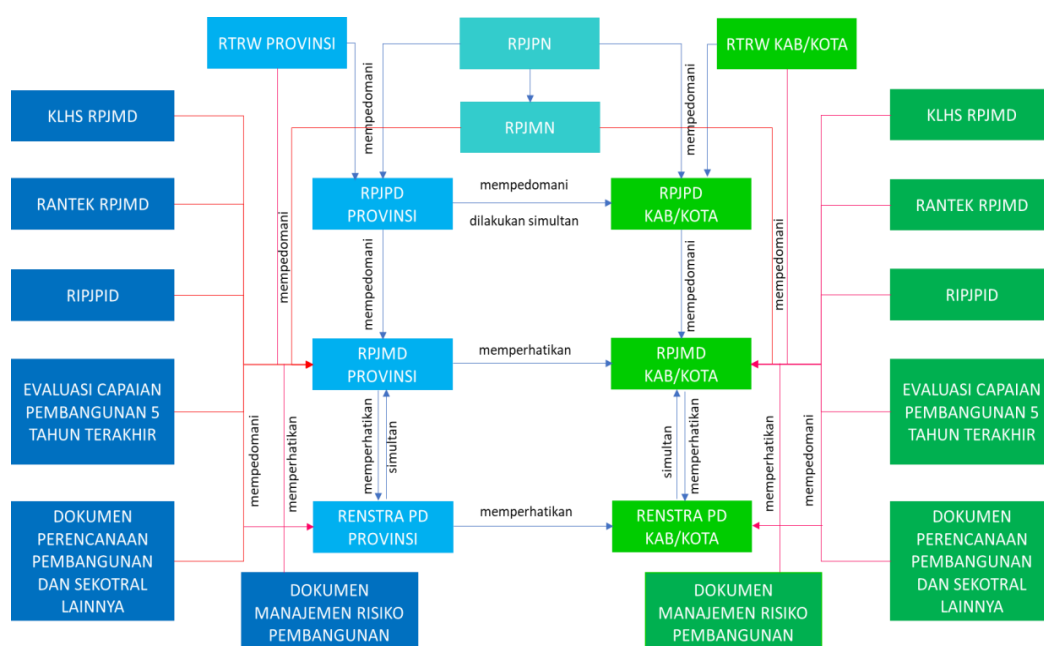


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Selain itu juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,

terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025- 2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun daerah. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, RTRW dan hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 1.2
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA DINAS
PPKBP3A



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025– 2029 memiliki keterkaitan langsung dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, karena merupakan dokumen turunan yang menjabarkan arah kebijakan dan target pembangunan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dokumen ini menjadi acuan operasional bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di Kabupaten Sumedang.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berdasarkan atas dasar hukum sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
15. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
29. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Hasil Pemetaan Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
43. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13 Seri E);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 10)
52. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 11)
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 17);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025- 2029 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8);

59. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode lima tahun mendatang serta sebagai dasar pengambilan keputusan bagi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yaitu Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Perangkat Daerah berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan; dan
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yang berisi tentang gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas PPKBP3A yang meliputi :

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode Tahun 2020 – 2024; dan
- d. Kelompok sasaran layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PPKBP3A sebagai berikut :

- a. Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP3A.
- b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan arah strategis pembangunan jangka menengah perangkat daerah, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai selama periode lima tahun yang berisi :

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
- 3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan serta mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dalam RPJMD 2025-2029 ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, dengan rincian sebagai berikut :

- 4.1. Teknik merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah;
- 4.2. Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan;
- 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah; dan
- 4.4. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan informasi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian dan Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas pokok dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugas tersebut mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pemberian pelayanan umum, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam lingkup urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesetaraan gender dan perlindungan anak.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesetaraan gender serta perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- c. Pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan instansi vertikal terkait dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

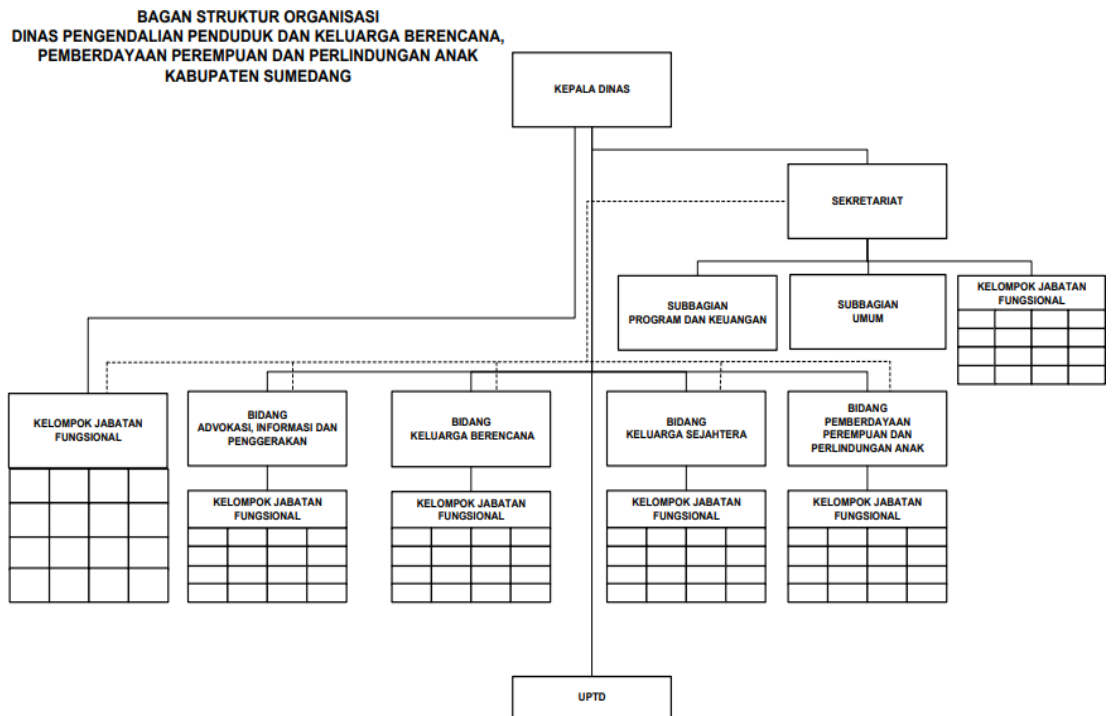
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahkan;
 - a. Sub bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub bagian Umum;
- 3) Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Keluarga Berencana, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5) Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7) UPTD, membawahkan;
 - a. Sub bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PPKBP3A
KABUPATEN SUMEDANG



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2024, jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 39 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling banyak berada di kelompok umur

>50 yaitu sebanyak 21 orang. Sedangkan kelompok umur 46 s/d 50 sebanyak 11 orang dan kelompok umur 41 s/d 45 sebanyak 5 orang, kemudian kelompok umur 36 s/d 40 sebanyak 2 orang.

Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 16 orang yang akan memasuki masa pensiun.

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI DINAS PPKBP3A Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	1	2	2	7	12
2	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	-	-	-	-	-	1	1	2
3	Bidang Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	1	1	2
4	Bidang Keluarga Sejahtera	-	-	-	-	-	1	1	2
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	1	1	2

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
5	UPTD Dalduk	-	-	-	-	-	3	6	9
6	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	-	1	3	2	4	10
TOTAL		-	-	-	2	5	11	21	39

Tabel tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang berdasarkan kelompok umur. Data ini penting untuk melihat struktur usia sumber-sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan. Berdasarkan data :

- a. Tidak terdapat pegawai berusia di bawah 35 tahun, baik pada kelompok umur < 25 tahun maupun 25-34 tahun. Artinya, saat ini DPPKBP3A tidak memiliki tenaga pegawai muda, yang dalam konteks manajemen sumber daya manusia menunjukkan belum adanya proses regenerasi yang aktif.
- b. Jumlah pegawai terbanyak berada pada kelompok umur :
 - ≥ 50 tahun sebanyak 21 orang (54%)
 - 41-50 tahun sebanyak 16 orang (41%)
 Dengan demikian 54% pegawai berada pada usia diatas 50 tahun, yang merupakan kategori usia menjelang pensiun atau menjelang akhir masa kerja aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang memiliki masa kerja yang relatif terbatas untuk ke depannya.
- c. Pegawai usia 36-40 tahun hanya berjumlah 2 (dua) orang (5%), dan tidak ada pegawai di bawah usia 35 tahun, yang berarti bahwa struktur usia pegawai sangat didominasi oleh pegawai berusia senior.

Implikasi Strategis :

- Urgensi regenerasi SDM : Ketiadaan pegawai muda menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan publik. Perlu dirancang strategi rekrutmen dan pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi digital dan inovatif.
- Peningkatan produktivitas dan tranfer pengetahuan : Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses tranfer pengetahuan dan pengalaman kerja, namun perlu juga

mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi, dan manajemen beban kerja.

- Perencanaan dan reformasi SDM : ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja); serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.
- Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai DPPKBP3A Kabupaten Sumedang tahun 2025 menunjukkan dominasi kelompok usia tua dengan tidak adanya pegawai muda. Hal ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif dan berdaya saing dimasa depan.

2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 8 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 31 orang.

TABEL 2.2

JUMLAH PEGAWAI DINAS PPKBP3A MENURUT GOLONGAN

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	-	9	3	12
2	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	-	-	2	-	2
3	Bidang Keluarga Berencana	-	-	1	1	2
4	Bidang Keluarga Sejahtera	-	-	-	2	2
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	1	1	2
6	UPTD Dalduk	-	-	8	1	9
7	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	10	-	10
TOTAL		-	-	31	8	39

3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 27 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 (lima) orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 4 orang, dan tingkat pendidikan SMA/SMK

sebanyak 3 (tiga) orang.

TABEL 2.3
JUMLAH PEGAWAI DINAS PPKBP3A MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/ SMK	D3	S1	S2/S3	
1	Sekretariat	-	-	1	1	7	3	12
2	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	-	-	1	-	1	-	2
3	Bidang Keluarga Berencana	-	-	1	-	1	-	2
4	Bidang Keluarga Sejahtera	-	-	-	-	-	2	2
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	2	-	2
6	UPTD Dalduk	-	-	-	-	9	-	9
7	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	-	3	7	-	10
TOTAL		-	-	3	4	27	5	39

4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 34 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 26 jabatan struktural, Jabatan Fungsioanal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 2 (dua) orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel

2.4. Sedangkan sisanya 11 (sebelas) orang adalah staf/Pelaksana. Data pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :

TABEL 2.4
JUMLAH PEGAWAI DINAS PPKBP3A MENURUT JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	21
4	Jabatan Fungsional	2
5	Pelaksana	11
TOTAL		39

5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang didominasi Perempuan sebanyak 29 orang, sedangkan Laki-Laki sebanyak 10 (sepuluh) orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

TABEL 2.5
JUMLAH PEGAWAI DINAS PPKBP3A MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	7	5	12
2	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	1	1	2
3	Bidang Keluarga Berencana	1	1	2
4	Bidang Keluarga Sejahtera	2	-	2
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	2
6	UPTD Dalduk	8	1	9
7	Sub Bagian Tata Usaha	9	1	10
TOTAL		29	10	39

- 6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**
 Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 86 persen Perempuan menduduki jabatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

TABEL 2.6
JUMLAH PEGAWAI DINAS PPKBP3A MENURUT JENIS
KELAMIN DAN JABATAN

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	19	2	21
4	Jabatan Fungsional	1	1	2
TOTAL		24	4	28

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik, Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

TABEL 2.7
JUMLAH ASET/MODAL MENURUT JENIS PADA DINAS PPKBP3A
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan Roda 4	11	10	1	Mobil Unit Pelayanan Rusak Berat
2.	Kendaraan Roda 2	193	98	95	Motor Rusak Berat Tahun Pembelian 2007,2009,2010,2011
3.	Peralatan kantor :				
	Komputer PC	81	27	54	Rusak Berat Tahun Pembelian 2009,2012,2013,2014,2016,2017,2018,2019
	Laptop	73	18	55	Rusak Berat Tahun Pembelian 2008,2009,2010,2011,2012,2014,2015,2016,2018,2019
	Printer	77	25	52	Rusak Berat Tahun Pembelian 2009,2011,2012,2013,2014,2016,2017,2018,2019
	Meja Kerja Kayu	146	30	116	Rusak Berat Tahun Pembelian 2009,2011,2012,2013,2014
	Meja ½ Biro	36	16	20	Rusak Berat Tahun Pembelian 1980,1983,2011,2019
	Meja Rapat	13	7	6	Rusak Berat Tahun Pembelian 2019
	Meja Kerja Besi/Metal	3	-	3	Rusak Berat Tahun Pembelian 2009
	Kursi Kerja Pejabat	11	11	-	-
	Kursi Lipat	133	-	133	Rusak Berat Tahun Pembelian 2012
	Kursi Putar	42	6	36	Rusak Berat Tahun Pembelian 2019
	Kursi Rapat	201	-	201	Rusak Berat Tahun Pembelian 2011,2012,2019
	Kursi Tamu	9	5	4	Rusak Berat Tahun Pembelian 2018,2019
	Lemari Penyimpanan (Excel)	3	-	3	Rusak Berat Tahun Pembelian 2016
	Lemari kaca	4	-	4	Rusak Berat Tahun Pembelian 2009
	Lemari Besi/Metal	16	10	6	Rusak Berat Tahun Pembelian 2019

	Lemari Kayu/Lemari Arsip	12	-	12	Rusak Berat Tahun Pembelian 2011,2013,2019
	Lemari dan Arsip Pejabat	13	-	13	Rusak Berat Tahun Pembelian 2012

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode Tahun 2020 - 2024

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari pencapaian indikator RPJMD dan RPD. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut :

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa secara umum realisasi indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencapai realisasi yang baik dan tidak baik, secara berurutan penjelasan indikator tersebut dideskripsikan dibawah ini :

1. Indikator TFR selama tahun 2020-2023 belum memenuhi target tahunan selama empat tahun. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka kelahiran seperti tingginya angka pasangan usia subur muda. Sedangkan di tahun 2024 atau di tahun kelima kondisi Indikator ini realisasinya lebih baik dan mengalami peningkatan capaian kinerja.
2. Indikator Persentase Keluarga Pra Sejahtera pada tahun 2020-2021 belum memenuhi target tahunan selama dua tahun. Hal ini disebabkan rendahnya motivasi keluarga pra sejahtera dalam berwirausaha dan bantuan modal untuk usaha masih terkendala. Sedangkan pada tahun 2022-2024 kondisi Indikator ini realisasinya lebih baik dan mengalami peningkatan capaian kinerja.
3. Indikator Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan pada tahun 2020-2021 tidak ada target dan realisasi di karenakan pada tahun tersebut indikator ini tidak digunakan yang kemudian pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga di susunlah perubahan renstra dan indikator tersebut baru digunakan. Sedangkan pada tahun 2022-2024 kondisi Indikator ini realisasi dan pencapaian kinerjanya baik.
4. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa pada tahun 2020-2021 tidak ada target dan realisasi di karenakan pada tahun tersebut indikator ini tidak digunakan yang kemudian pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga di susunlah perubahan renstra dan indikator tersebut baru digunakan. Sedangkan pada tahun 2022-2024 kondisi Indikator ini realisasi dan pencapaian kinerjanya baik.
5. Indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2020-2024 telah memenuhi

target yang baik, hal ini ditandai dengan tercapainya target tahunan selama lima tahun.

6. Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) pada tahun 2020-2024 telah memenuhi target yang baik, hal ini ditandai dengan tercapainya target tahunan selama lima tahun.
7. Indikator Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita telah menunjukkan realisasi yang baik, hal ini ditandai dengan tercapainya target tahunan selama lima tahun.
8. Indikator Cakupan Kelompok Ketahanan yang aktif pada tahun 2020- 2021 belum memenuhi target tahunan selama dua tahun. Hal ini disebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat, tenaga penyuluh dan keterbatasan anggaran yang bisa menghambat pembentukan dan penguatan kelompok ketahanan. Sedangkan pada tahun 2022-2024 kondisi Indikator ini realisasinya lebih baik dan mengalami peningkatan capaian kinerja.
9. Indikator Cakupan Perempuan dan Anak yang mendapatkan layanan dan perlindungan hukum pada tahun 2020-2021 tidak ada target dan realisasi di karenakan pada tahun tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih di Dinas Sosial yang kemudian pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sehingga di susunlah perubahan renstra sehingga indikator tersebut pada tahun 2022 baru digunakan akan tetapi belum dapat memenuhi target tahunan selama satu tahun. Hal ini disebabkan Banyak korban tidak melapor karena takut, malu, atau tekanan sosial. Sedangkan pada tahun 2023-2024 kondisi Indikator ini realisasinya lebih baik dan mengalami peningkatan capaian kinerja.
10. Indikator Persentase OPD Responsip Gender pada tahun 2020-2021 tidak ada target dan realisasi di karenakan pada tahun tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih di Dinas Sosial yang kemudian pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sehingga di susunlah perubahan renstra sehingga indikator tersebut pada tahun 2022-2024 baru digunakan akan tetapi belum dapat memenuhi target tahunan selama tiga tahun. Hal ini disebabkan Banyak OPD masih memiliki pemahaman yang terbatas atau keliru mengenai isu gender. Gender sering kali masih dianggap sebagai isu "perempuan saja", padahal sebenarnya menyangkut keadilan dan kesetaraan bagi semua gender dan Banyak OPD belum menerapkan PPRG secara efektif, padahal ini adalah alat penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran

mendukung kesetaraan gender.

11. Indikator Persentase Perlindungan Perempuan Korban kekerasan pada tahun 2020-2021 tidak ada target dan realisasi di karenakan pada tahun tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih di Dinas Sosial yang kemudian pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sehingga di susunlah perubahan renstra sehingga indikator tersebut pada tahun 2022-2024 baru digunakan akan tetapi pada tahun 2022 belum dapat memenuhi target tahunan selama satu tahun. Hal ini disebabkan Kurangnya informasi yang menjangkau korban mengenai hak dan layanan yang tersedia. Sedangkan pada tahun 2023-2024 kondisi Indikator ini realisasinya lebih baik dan mengalami peningkatan capaian kinerja.
12. Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan pada tahun 2020-2021 tidak ada target dan realisasi di karenakan pada tahun tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih di Dinas Sosial yang kemudian pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sehingga di susunlah perubahan renstra sehingga indikator tersebut pada tahun 2022-2024 baru digunakan akan tetapi pada tahun 2022 belum dapat memenuhi target tahunan selama satu tahun. Hal ini disebabkan belum efektif atau belum menjangkau sasaran secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan, peran dan kapasitas perempuan dalam keluarga. Sedangkan pada tahun 2023-2024 kondisi Indikator ini realisasinya lebih baik dan mengalami peningkatan capaian kinerja.
13. Indikator Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak pada tahun 2020-2021 tidak ada target dan realisasi di karenakan pada tahun tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih di Dinas Sosial yang kemudian pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka di susunlah perubahan renstra sehingga indikator tersebut pada tahun 2022-2024 baru digunakan akan tetapi belum dapat memenuhi target tahunan selama tiga tahun. Hal ini disebabkan belum lengkapnya data yang diperlukan untuk mendukung kebijakan responsif gender dan perlindungan anak.
14. Indikator Persentase forum anak, termasuk forum anak yang

ada di kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada tahun 2020- 2021 tidak ada target dan realisasi di karenakan pada tahun tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih di Dinas Sosial yang kemudian pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sehingga di susunlah perubahan renstra sehingga indikator tersebut pada tahun 2022-2024 baru digunakan akan tetapi belum dapat memenuhi target tahunan selama tiga tahun. Hal ini disebabkan belum semua wilayah memiliki forum anak yang aktif, berdaya guna sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan juga tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan forum anak.

15. Indikator Persentase Pendampingan Khusus terhadap anak korban tindak kekerasan pada tahun 2020-2021 tidak ada target dan realisasi di karenakan pada tahun tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih di Dinas Sosial yang kemudian pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sehingga di susunlah perubahan renstra sehingga indikator tersebut pada tahun 2022-2024 baru digunakan dan kondisi Indikator ini realisasi dan pencapaian kinerjanya baik.

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja pelayanan OPD disajikan pada Tabel 2.8 dan Realisasi Anggaran pada Tabel 2.9 di bawah ini:

TABEL 2.8
PENCAPAIAN PELAYANAN DINAS PPKBP3A

N O	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lain	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Ferlity Rate (TFR)				2.05 klh	2.03 klh	2.07 klh	2.04 klh	2.04 klh	2.12 klh	2.10 klh	2.08 klh	2.05 klh	2.03 klh	96.5%	96.5%	99.5%	99.5%	100.4 %
2	Persentase keluarga Pra Sejahtera				3.30 %	2.88 %	3.97 %	3.76 %	2.81 %	4.51 %	3.23 %	2.84%	2.66%	2.75%	63.3%	87.8%	128.4 %	129.2 %	102.1 %
3	Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan				-	-	5%	5%	10%	-	-	5%	-	10%	-	-	100%	-	100%
4	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
5	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CP R bagi perempuan menikah usia 15-49				74.77 %	75.07 %	75.37 %	75.67 %	75.97 %	81.64 %	81.1 %	79.94 %	80.63 %	81.98 %	109.1 %	108%	106%	106.5 %	107.9 %

6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)				9.07%	9.06%	9.05%	9.04%	9.01%	8.22 %	8.50 %	9.01%	8.06%	8.69%	109,3%	106.1 %	100.4 %	110.8 %	103.5 %
7	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita				19.70 thn	19.70 thn	22.10 thn	22.10 thn	22.10 thn	21.77 thn	22.11 thn	22.75 thn	22.45 thn	22.73 thn	110.5 %	112.2 %	102.9 %	101.5 %	102.8 %
8	Cakupan kelompok ketahanan yang aktif				67.01%	67.30 %	67.54%	67.84 %	70.00%	43.44 %	45.07%	79.01%	80.02%	81.74%	64.8 %	66.9 %	116.9%	117.9%	116.7 %
9	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan dan perlindungan hukum				-	-	23.94%	26.60 %	29.55%	-	-	18.00%	32.33%	48.67%	-	-	75.1%	121.5%	164.7 %
10	Persentase OPD Responsip Gender				-	-	45.16%	61.29 %	65.00%	-	-	43.63%	52.72%	53.70%	-	-	96.6%	86.0%	82.6%
11	Persentase Perlindungan Perempuan Korban kekerasan				-	-	0.0034 %	0.0035 %	0.0036 %	-	-	0.0033 %	0.0087%	0.0096%	-	-	97.0%	248.5%	266.6 %
12	Persentase pemberdayaan peningkatan kualitas keluarga bagi perempuan				-	-	12.15%	16.53 %	33.06%	-	-	12.14%	40.75%	41.23%	-	-	99.9%	246.5%	124.7 %
13	Persentase Ketersediaan				-	-	33.30%	33.30 %	42%	-	-	18.51%	18.51%	18.51%	-	-	55.5%	55.5%	44.1%

	Data Gender dan Anak																		
14	Persentase forum anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kot a, Kecamatan dan Desa/Keluraha n				-	-	46.15%	65.38 %	69.07%	-	-	26.35%	54.80%	54.80%	-	-	57.0%	83.8%	79.3%
15	Persentase Pendampingan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan				-	-	0.009%	0.020 %	0.023%	-	-	0.010%	0.034%	0.053%	-	-	111.1%	170.0%	230.4 %

TABEL 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PPKBP3A

Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Pagu Indikatif) pada Tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5
APBN	8.577.332.000	8.897.345.000	11.018.791.000	14.624.062.000	17.941.120.000	8.561.516.000	8.673.981.750	10.508.080.600	14.359.086.142	17.475.678.538	99 %	97 %	95 %	98 %	97 %
Banprop	-	-	-	436.000.000	600.000.000	-	-	-	402.334.000	439.862.000	-	-	-	92 %	67 %
APBD	9.907.420.622	9.291.717.497	12.784.900.368	13.217.751.065	11.983.731.355	9.545.513.770	8.376.651.254	12.024.693.981	12.750.473.322	11.627.718.594	96 %	90 %	94 %	96 %	97 %

2.1.3.1 Kelompok Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Kelompok sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di

26 Kecamatan se Kabupaten Sumedang, baik perorangan maupun kelompok, yang memiliki kebutuhan untuk memperoleh pelayanan publik dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Kelompok sasaran (BKB,BKL,BKR,UPPKA,PEKKA,dll) ini meliputi berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan demografi yang beragam, seperti warga yang memerlukan pelayanan ber-KB, Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu, kelompok sasaran juga mencakup para pemangku kepentingan lokal seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan pihak swasta yang berinteraksi dengan penyelenggaraan kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara adil, transparan, dan akuntabel serta mendukung terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan inklusif pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

2.1.3.2 Mitra Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari peran serta dan dukungan mitra kerja. Mitra kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Kabupaten Sumedang terdiri dari :

No.	Mitra Kerja	Tugas dan Fungsi
1.	BAPPPEDA	Sebagai mitra perencanaan
2.	BPKA	Sebagai mitra penganggaran dan penatausahaan keuangan
3.	Inspektorat	Sebagai mitra pengawasan
4.	Dinas Kesehatan	Sebagai mitra pelayanan KB
5.	Dinas Sosial	Sebagai mitra sosial dan kemasyarakatan
6.	Lembaga Pendidikan -Dinas Pendidikan -UNSAP -UNPAD	Sebagai mitra untuk penyampaian sosialisasi kependudukan, pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak pada jalur formal.

Semua mitra kerja dalam memberikan dukungannya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing. Dinas tersebut mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kerja sama dengan mitra kerja telah berjalan dengan baik dan mendukung pelaksanaan program DPPKBP3A, meskipun masih diperlukan peningkatan koordinasi, komunikasi, serta evaluasi berkelanjutan agar hasilnya lebih optimal dan berkesinambungan.

2.1.3.3 Dukungan BUMD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan lembaga usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang berperan mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus membantu pelaksanaan program pemerintah daerah termasuk program Dinas PPKBP3A. Dukungan program dan kegiatan bersama, berpartisipasi dalam program lintas sektor, seperti :

- Kampanye “Gerakan Keluarga Sehat dan Tangguh”,
- Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi,
- Edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. BUMD dapat menjadi mitra pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kerja masing-masing, diantaranya :

- a. Bank Daerah (Bank Sumedang)
- b. PDAM

2.1.3.4 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah segala bentuk kemitraan dan koordinasi antara pemerintah daerah (melalui dinas ini) dengan pihak lain baik antar instansi pemerintah, lembaga swasta, BUMN/BUMD, maupun organisasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Secara umum, ada empat jenis utama kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab atau berada dalam kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. Kerja Sama Antar Perangkat Daerah (Internal Daerah) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan OPD lain seperti :

- Dinas Kesehatan → pelaksanaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- Dinas Sosial → penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Dinas Pendidikan → pendidikan kesetaraan gender dan perlindungan anak di sekolah.
- Bappeda → perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Tujuan : menyinergikan kebijakan pembangunan daerah agar berpihak pada keluarga, perempuan, dan anak.

- b. Kerja Sama Antar Daerah

Kerjasama ini dilakukan dengan kabupaten/kota lain atau provinsi untuk :

- Pertukaran data dan informasi tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Kolaborasi pelatihan kader, penyuluh KB, atau petugas perlindungan anak.
- Pengembangan model desa/kelurahan ramah anak dan responsif gender lintas daerah.

Tujuan : memperkuat pelaksanaan program lintas wilayah dan pemerataan layanan.

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup kemitraan lintas instansi, antar daerah, dan dengan lembaga non pemerintah. Bentuk kerjasama ini berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan program

pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara terpadu dan berkelanjutan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan pada tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi dan telaahan terhadap instansi vertikal yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Adapun penyebab dari permasalahan utama yang menjadi dasar perbaikan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

TABEL 2.10
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

No	Aspek	Permasalahan	Akar Masalah
1	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	Tidak sinkronnya data kependudukan	1. Kurang akuratnya data pengendalian penduduk dan KB 2. Kurangnya pengawasan dan verifikasi data proses validasi dan audit data kependudukan tidak dilakukan secara berkala dan menyeluruh, yang membuat data menjadi kedaluwarsa atau ganda
2	Bidang Keluarga Berencana	Masih rendahnya peserta KB yang menggunakan metode MKJP	1. Rendahnya akseptor KB pria 2. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang mampu memberikan layanan MKJP masih terbatas 3. Kurangnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan 4. Rendahnya KIE kepada masyarakat

3	Bidang Keluarga Sejahtera	Belum optimalnya pembinaan kemandirian kelompok ketahanan dan pemberdayaan ekonomi	1. Rendahnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2. Rendahnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Belum optimalnya kelembagaan pengarusutamaan gender	1. Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga pemerintah masih rendah 2. Kurangnya partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan 3. Kurangnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

No	Aspek	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Pencegahan dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak belum optimal	Masih rendahnya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi
		3. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak masih rendah
		4. Belum optimalnya kelembagaan pemenuhan hak anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak masih rendah
		5. Pencegahan dan pendampingan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak belum optimal	Masih rendahnya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi

2.2.2 Isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telaahan visi, misi, dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama Periode 2019-2023 dan 2024-2026, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2025- 2029.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek yakni :

1. Permasalahan dalam Advokasi, Informasi dan Penggerakan;
2. Permasalahan terkait Keluarga Berencana;

3. Permasalahan dalam perwujudan keluarga sejahtera.
4. Permasalahan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk Lebih jelasnya disajikan pada Tabel di bawah ini :

TABEL 2.11
TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kesejahteraan dan ketahanan sosial	1. Tidak sinkronnya data kependudukan 2. Masih rendahnya peserta KB yang menggunakan metode MKJP 3. Belum optimalnya pembinaan dan kemandirian kelompok ketahanan dan pemberdayaan ekonomi 4. Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender 5. Pencegahan dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak belum optimal 6. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak 7. Belum optimalnya pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Perlindungan dan bantuan sosial serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga	Pertumbuhan penduduk dan urabanisasi	Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, kesenjangan partisipasi gender, kekerasan dan eksploitasi anak, serta kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi.	Kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti rumah aman bagi korban kekerasan, serta optimalisasi partisipasi dan dukungan lintas sektor	1. Masih belum optimalnya pengendalian penduduk melalui keluarga berkualitas 2. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

	8. Pencegahan dan pendampingan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak belum optimal					
--	---	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

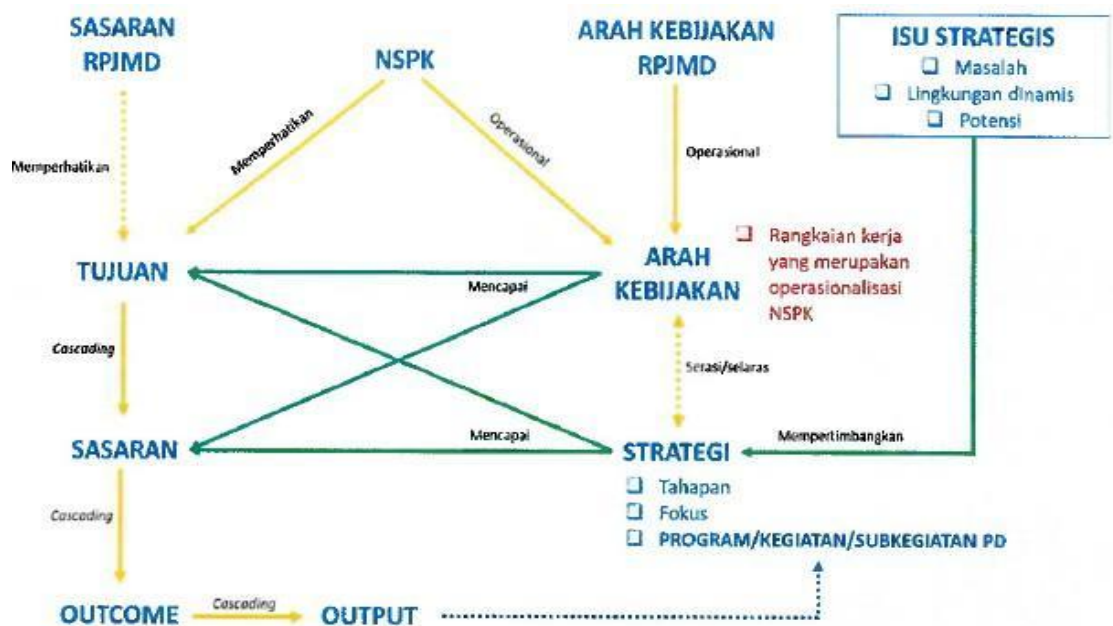
1. Masih belum optimalnya pengendalian penduduk melalui keluarga berkualitas;
2. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam periode perencanaan sebagai wujud operasionalisasi dari visi dan misi pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan untuk memberikan arah yang jelas terhadap pencapaian visi daerah, sedangkan strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut secara efektif, efisien, dan terukur. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya, isu-isu strategis daerah, serta potensi dan tantangan yang dihadapi dalam berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian, setiap tujuan dan sasaran mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan. Adapun konsep Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 3.1
KONSEP RENSTRA DINAS PPKBP3A

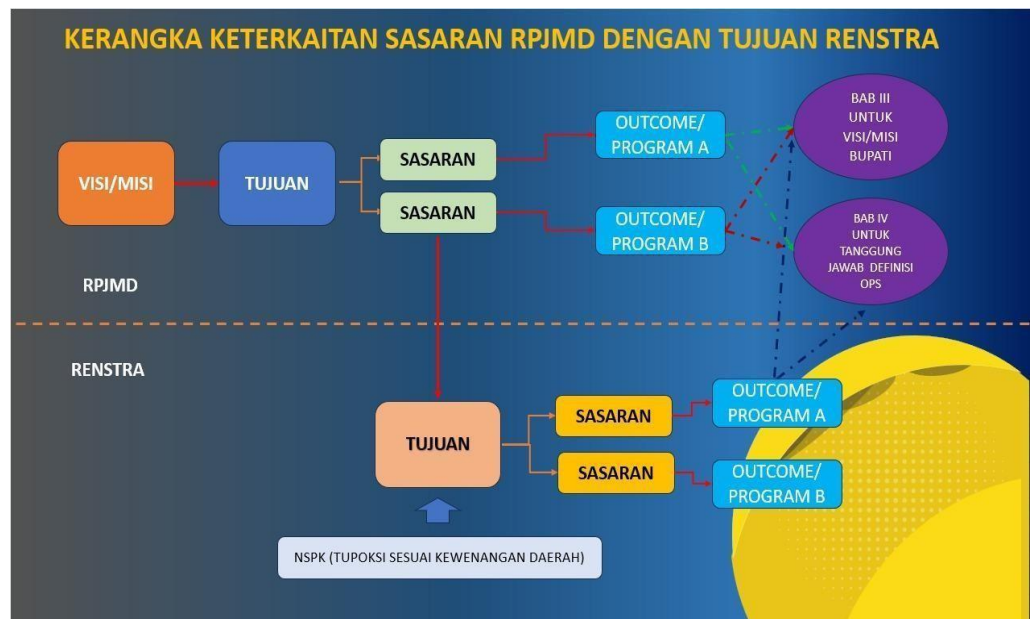


3.1. Tujuan

Perumusan tujuan menggambarkan hasil jangka menengah yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029 dalam mendukung capaian kinerja pembangunan daerah masuk dalam misi kelima yaitu **Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial**, dengan tujuan RPJMD **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial**. Adapun Sasaran RPJMD kemudian diturunkan menjadi tujuan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029 yaitu **Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender**. Keterkaitan antara sasaran RPJMD dan tujuan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 3.2
KERANGKA KETERKAITAN SASARAN RPJMD DENGAN
TUJUAN RENCANA STRATEGIS DINAS PPKBP3A



3.2. Sasaran

Sasaran merupakan pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah agar setiap upaya pembangunan dapat diarahkan secara efektif dan efisien. Setiap sasaran disusun secara terukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran (IKS), sehingga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. IKU dan IKS diperoleh dari indikator yang terseleksi dengan menggunakan teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra dan telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.1
TEKNIK MERUMUSKAN
TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR
RENSTRA DINAS PPKBP3A

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender	Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	60,83	65,29	67,29	69,29	71,29	73,29	75,29	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	68,44	69,80	71,19	72,61	74,06	75,54	77,05	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,217	0,45-0,44	0,43-0,42	0,42-0,41	0,41-0,40	0,40-0,39	0,39-0,38	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	96,22	96,56	96,78	97,01	97,23	97,46	97,69	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	72,60	76,14	76,28	76,78	77,23	77,55	77,80	
		Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga Berkualitas	Total Fertility Rate (TFR) (Orang)	2,0300	2,0252	2,0242	2,0232	2,0222	2,0221	2,0191	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Nilai Penganugerah Parahita Ekapraya Daerah (APE) (Nilai)	-	630	660	690	730	760	790	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	-	750	800	820	840	860	880	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah		Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64	3,647	3,648	3,649	3,650	3,651	3,652	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	78,78	79,48	80,18	80,88	81,58	82,28	82,98	

3.3. Strategi

Strategi pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dirumuskan sebagai arah dan langkah-langkah utama yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode perencanaan. Strategi pembangunan ini berorientasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang terpadu dan disusun berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) and Ancaman *Threats* (SWOT). Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
ANALISIS SWOT LINGKUNGAN STRATEGI
INTERNAL DAN EKSTERNAL

Peluang (<i>Opportunities</i> (O))		Ancaman (<i>Threats</i> (T))
1. Adanya dukungan regulasi nasional dan daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; 2. Peningkatan perhatian publik terhadap isu gender dan perlindungan anak; 3. Peluang kemitraan dengan lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat		1. Peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak- anak 2. Perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pola keluarga dan partisipasi dalam ber- KB; 3. Penurunan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak

Kekuatan (Strengths (S))	Alternatif Strategi (S-O)	Alternatif Strategi (S-T)
1. Komitmen yang baik dari pimpinan; 2. Integrasi yang kuat dalam struktur organisasi 3. Motivasi yang tinggi dalam pengembangan kemampuan; 4. Tersedianya tenaga penyuluh/kader KB dan pendampingan keluarga; 5. Inovasi dan kreativitas dalam pelayanan.	1. Mengoptimalkan jejaring kelembagaan untuk menjangkau layanan serta mendukung kebijakan pembangunan; 2. Menjalin sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan; 3. Menyusun kebijakan daerah untuk memperkuat perlindungan anak dan perempuan.	1. Memperluas jangkauan layanan dan penyuluhan ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran ber-KB dan kesetaraan gender; 2. Optimalisasi dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan terhadap isu gender dan perlindungan anak; 3. Optimalisasi tenaga pendukung pelayanan program kepada masyarakat.
Kelemahan (Weaknesses (W))	Alternatif Strategi (W-O)	Alternatif Strategi (W-T)
1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) baik dari segi jumlah, kompetensi maupun penguasaan teknologi; 2. Masih rendahnya koordinasi lintas bidang baik internal Dinas atau yang melibatkan lembaga lain dan pemangku kepentingan; 3. Belum optimalnya ketersediaan dan integrasi data dan informasi; 4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung	1. Optimalisasi integrasi data dan informasi pada platform digital pemerintah daerah dan pusat; 2. Optimalisasi kemitraan dengan berbagai sektor; 3. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pembinaan dan bimbingan teknis.	1. Peningkatan pelayanan dan kerjasama dengan lembaga sosial dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan anak dan perempuan; 2. Penguatan kelembagaan dan reformasi tatakelola internal; 3. Sosialisasi untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap kesetaraan gender dan perencanaan keluarga.

pelayanan KB, puspaga dan penanganan kekerasan perempuan dan anak		
--	--	--

Berdasarkan hasil analisis diatas, dalam rangka mendukung misi kelima RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang telah dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan inovasi keluarga berkualitas di seluruh wilayah;
2. Peningkatan peran masyarakat dalam perwujudan keluarga sejahtera;
3. Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan
4. Peningkatan pelayanan perlindungan terhadap anak.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 maka disusun penahapan prioritas pembangunan tahunan, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

TABEL 3.3
PENAHAPAN RENCANA STRATEGI DINAS PPKBP3A

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Akselerasi Pencegahan Penguatan Edukasi & melalui sosialisasi kampanye keluarga berencana, gizi seimbang, pola asuh anak, kesetaraan gender serta Melibatkan sekolah, media, tokoh agama/ masyarakat.	Penguatan & Implementasi Layanan Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Integrasi Program Lintas Sektor, Pemanfaatan Teknologi & Media Digital	Konsolidasi dan Kemandirian untuk Penguatan Data & Inovasi Berbasis Bukti	Inovasi & transformasi Integrasi dengan Kebijakan Makro Sinkronisasi program dengan RPJMD, RPJMN, SDGs, dan target pembangunan nasional. Memastikan isu kependudukan, KB, PPA masuk ke mainstream pembangunan daerah.	Sustainability dan <i>Legacy</i> Penguatan Keberlanjutan Program.

Berdasarkan Tabel diatas, dalam upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender disusun secara bertahap melalui lima fase yang terencana dan berkesinambungan. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pembangunan memiliki fokus dan target yang terukur sehingga arah kebijakan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

3.4. Arah Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal melalui pendekatan SWOT, serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target. Arah kebijakan mengacu pada rumusan kerangka kerja dalam mendukung pencapaian misi RPJMD Tahap Pertama Tahun 2025-2029 yaitu

“Penguatan Pondasi Pembangunan Daerah” sebagai penguatan modalitas atau sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan. Adapun arah kebijakan dalam mencapai strategi diatas adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan inovasi keluarga berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam penciptaan keluarga Sejahtera
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
4. Meningkatkan upaya perlindungan anak

Penjelasan keselarasan antara arah kebijakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan arah kebijakan RPJMD dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

TABEL 3.4
ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS DINAS PPKBP3A

Operasionalisas i NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPPKBP3A
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak 2. Meningkatkan upaya perlindungan anak
	2. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	3. Meningkatkan inovasi keluarga berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi
	3. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	4. Meningkatkan peran masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera

Sedangkan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut :

TABEL 3.5
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

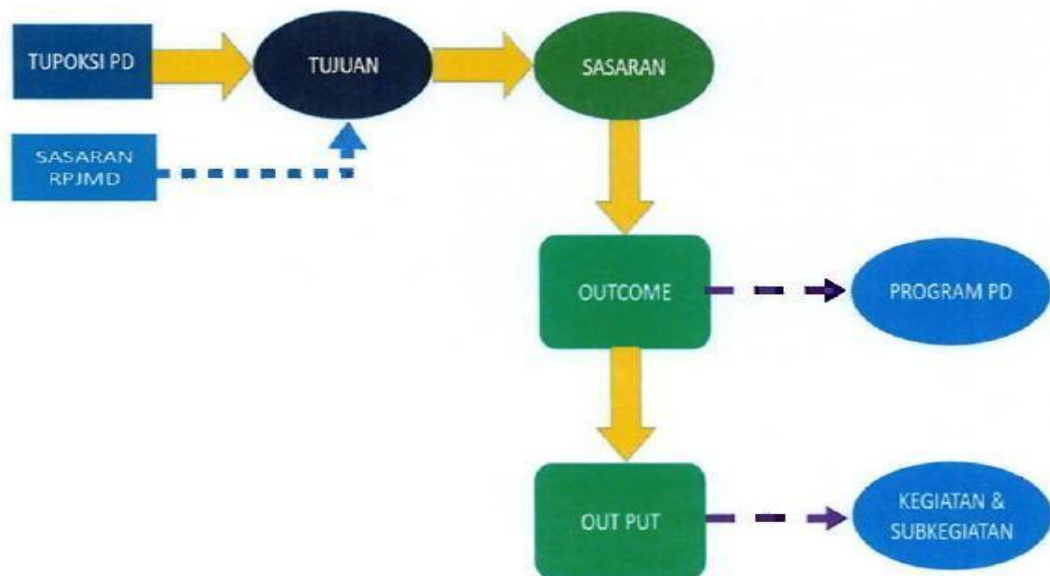
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Optimalisasi pengendalian penduduk melalui keluarga berkualitas	Peningkatan inovasi keluarga berkualitas di seluruh wilayah	Meningkatkan inovasi keluarga berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi
		Peningkatan peran masyarakat dalam perwujudan keluarga sejahtera	Meningkatkan peran masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera
	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Peningkatan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan pelayanan perlindungan terhadap anak	Meningkatkan upaya perlindungan anak
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan yang didalamnya tertuang penjabaran hierarkis dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*, yang merupakan hasil dari proses *cascading* atau Pohon Kinerja. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya proses ini memastikan bahwa setiap tingkatan dalam organisasi berkontribusi secara selaras untuk mencapai kinerja yang diinginkan, dengan tujuan strategis diuraikan ke sasaran, lalu ke *outcome* dan *output*, kemudian diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang terukur. Adapun kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
**KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENSTRA DINAS PPKBP3A**



Berdasarkan Gambar 4.1 diatas, menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada sasaran RPJMD. Pedoman ini dirumuskan menjadi tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.

Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan *outcome*, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. *Outcome* menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan *output* sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara *outcome* dan *output* menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.

Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal antara dokumen perencanaan tingkat daerah dengan perencanaan di tingkat kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional.

4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait.

Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis indikator pelayanan publik serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, Forum SKPD dan koordinasi lintas sektor. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, yaitu Masih belum optimalnya pengendalian penduduk melalui keluarga berkualitas dan Masih rendahnya pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Selanjutnya dilakukan penyelarasan prioritas program dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk integrasi agenda global seperti tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penyelarasan ini menjamin relevansi dan kesinambungan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung target pembangunan daerah.

Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Dengan teknik ini, diharapkan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang selama periode 2025–2029 tidak hanya mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta memperkuat koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai. Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang

selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 maka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah. Pada akhirnya, dilakukan teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN RENSTRA DINAS PPKBP3A

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
2.14.2.08.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah - Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah; - Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Kesetaraan				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)			
					Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)			
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)			
					Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)			
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)			
					Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)			
		Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga Berkualitas		Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk		Total Fertility Rate (TFR). (Orang)		
						Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
						Meningkatnya Pemahaman Pendidik Tingkat SLTP terhadap Kebijakan Pembangunan Kependudukan	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
						Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Perkembangan Data Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			Meningkatnya Jumlah Akseptor KB		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Meningkatnya Layanan Terhadap Akseptor KB	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesetaraan KB Pria	
					Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Meningkatnya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
				Meningkatnya Kapasitas Tenaga Lini Lapangan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	

					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)	
--	--	--	--	--	---	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
--	--	--	--	--	--	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	

				Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

				Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
					Meningkatnya Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraangender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
					Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas	2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan	

					Kabupaten/Kota (Lembaga)	Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Meningkatnya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara kompherensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA	

						Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	

					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.08.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.08.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program merupakan alat atau wadah pelaksanaan strategi pembangunan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah secara terukur dan terencana. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian *outcome*. Untuk menjamin efektivitas dalam pelaksanaannya, setiap program, kinerja dan target kinerja serta kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya program tersebut secara rinci dijabarkan kedalam kegiatan kegiatan, dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan setiap indikator. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada target strategi dan arah kebijakan. Kerangka pendanaan adalah rencana pembiayaan indikatif yang menunjukkan perkiraan kebutuhan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas selama periode rencana strategis yaitu Tahun 2025 – 2029 dan berfungsi sebagai gambaran kapasitas keuangan perangkat daerah dalam melaksanakan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan daerah pada Tahun 2030 merupakan tahun transisi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2030 yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode Tahun 2030-2034. Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan kerangka pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 termasuk daftar sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dan telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10.805.000.000,00		11.475.000.000,00		11.675.000.000,00		12.045.000.000,00		12.250.000.000,00		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.650.000.000,00		9.150.000.000,00		9.250.000.000,00		9.500.000.000,00		9.500.000.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	80	87,68	8.650.000.000,00	88,03	9.150.000.000,00	88,38	9.250.000.000,00	88,73	9.500.000.000,00	89,08	9.500.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				113.100.000,00		124.410.000,00		136.851.000,00		139.500.000,00		141.500.000,00		
Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	113.100.000,00	1	124.410.000,00	1	136.851.000,00	1	139.500.000,00	1	141.500.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9		9		9		9					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3		3		3		3					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3	30.000.000,00	3	33.000.000,00	3	36.300.000,00	3	37.000.000,00	3	38.000.000,00		
2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11.500.000,00		12.650.000,00		13.915.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.500.000,00	1	12.650.000,00	1	13.915.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00		
2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.000.000,00		6.600.000,00		7.260.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.000.000,00	1	6.600.000,00	1	7.260.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00		
2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.000.000,00		4.400.000,00		4.840.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.000.000,00	1	4.400.000,00	1	4.840.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				4.600.000,00		5.060.000,00		5.566.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.600.000,00	1	5.060.000,00	1	5.566.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		

2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				37.000.000,00		40.700.000,00		44.770.000,00		45.000.000,00		46.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9	37.000.000,00	9	40.700.000,00	9	44.770.000,00	9	45.000.000,00	9	46.000.000,00		
2.08.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.863.252.400,00		7.230.234.000,00		7.275.793.000,00		7.621.200.000,00		7.631.700.000,00		
Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	6.863.252.400,00	1	7.230.234.000,00	1	7.275.793.000,00	1	7.621.200.000,00	1	7.631.700.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	31		27		25		25		23			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.845.252.400,00		7.210.434.000,00		7.254.143.000,00		7.597.385.000,00		7.605.503.500,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	31	6.845.252.400,00	27	7.210.434.000,00	25	7.254.143.000,00	25	7.597.385.000,00	23	7.605.503.500,00		
2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00		
2.08.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				3.000.000,00		3.300.000,00		3.500.000,00		3.850.000,00		4.235.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	-	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00	1	3.500.000,00	1	3.850.000,00	1	4.235.000,00		
2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD (Laporan)	4	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.100.000,00	4	13.310.000,00	4	14.641.000,00		
2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2				2		2		2			
2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM E / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				315.447.600,00		326.500.000,00		363.500.000,00		370.500.000,00		358.000.000,00		
Terpenuhinya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	315.447.600,00	1	326.500.000,00	1	363.500.000,00	1	370.500.000,00	1	358.000.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			1

	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.000.000,00		23.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19.000.000,00	1	23.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.000.000,00		28.000.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	23.000.000,00	1	28.000.000,00	1	35.000.000,00	1	37.000.000,00	1	40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				57.947.600,00		60.000.000,00		83.000.000,00		85.000.000,00		86.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	57.947.600,00	1	60.000.000,00	1	83.000.000,00	1	85.000.000,00	1	86.000.000,00		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000,00		7.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00		
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				33.500.000,00		33.500.000,00		33.500.000,00		33.500.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00	1	33.500.000,00	1	11.000.000,00		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00		
2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.08.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				63.500.000,00		248.000.000,00		248.000.000,00		203.000.000,00		203.000.000,00		
Terpernuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	63.500.000,00	8	248.000.000,00	8	248.000.000,00	5	203.000.000,00	5	203.000.000,00		

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	59	30		9		9		9		9			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	2		2		2		2		2			
2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				7.500.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	59	30	7.500.000,00	9	18.000.000,00	9	18.000.000,00	9	18.000.000,00	9	18.000.000,00		
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	6.000.000,00	8	180.000.000,00	8	180.000.000,00	5	135.000.000,00	5	135.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM E / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				486.700.000,00		492.800.000,00		492.800.000,00		492.800.000,00		492.800.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	486.700.000,00	1	492.800.000,00	1	492.800.000,00	1	492.800.000,00	1	492.800.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				89.700.000,00		93.800.000,00		93.800.000,00		93.800.000,00		93.800.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	89.700.000,00	12	93.800.000,00	12	93.800.000,00	12	93.800.000,00	12	93.800.000,00		
2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				372.000.000,00		372.000.000,00		372.000.000,00		372.000.000,00		372.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	372.000.000,00	12	372.000.000,00	12	372.000.000,00	12	372.000.000,00	12	372.000.000,00		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				663.000.000,00		583.056.000,00		588.056.000,00		528.000.000,00		528.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	20	663.000.000,00	20	583.056.000,00	20	588.056.000,00	20	528.000.000,00	20	528.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	215	135		202		202		180		180			

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000,00		363.056.000,00		363.056.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	215	135	200.000.000,00	202	363.056.000,00	202	363.056.000,00	180	300.000.000,00	180	300.000.000,00		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	25.000.000,00	20	28.000.000,00	20	28.000.000,00		
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM E / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	1	2	400.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	-	1	43.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				810.000.000,00		900.000.000,00		925.000.000,00		950.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya Kelembagaan Pengarurusan an Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	41,34	57,62	200.000.000,00	65,76	250.000.000,00	73,90	275.000.000,00	82,04	300.000.000,00	90,18	350.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.0 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarurusan an Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Meningkatnya Pengarurusan (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	2	200.000.000,0 0	2	250.000.000,0 0	2	275.000.000,0 0	2	300.000.000,0 0	2	350.000.000,0 0		
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	-	1				1				1			
	jumlah OPDKab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	54				54				54			
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	-	54				54				54			

2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	-	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	130.000.000,00		
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM E / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGA N		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	70.000.000,00				
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/ Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	-	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00				
Meningkatnya Pemberdayaa n Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	54,65	56.42-56.91	610.000.000,00	57.53-58.54	650.000.000,00	58.73-60.14	650.000.000,00	59.84-61.71	650.000.000,00	61.28-63.24	650.000.000,00				
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				410.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00				
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	5	5	410.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00				
	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	-	121				200				200				200	
	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	140	539				539				539				539	
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam				60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				

Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan / profesi / dunia usaha / media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	5	5	60.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	140	539	250.000.000,00	539	250.000.000,00	539	250.000.000,00	539	250.000.000,00	539	250.000.000,00		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM E / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	-	121	100.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	305	200.000.000,00	305	200.000.000,00	305	200.000.000,00	305	200.000.000,00	305	200.000.000,00		
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	305	100.000.000,00	305	100.000.000,00	305	100.000.000,00	305	100.000.000,00	305	100.000.000,00		
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

Kewenangan Kabupaten/Kota														
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				220.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		320.000.000,00		400.000.000,00		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	-	100	220.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	320.000.000,00	100	400.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				220.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		320.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	13	220.000.000,00	19	250.000.000,00	25	275.000.000,00	31	320.000.000,00	37	400.000.000,00		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	13		19		25		31		37			
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				110.000.000,00		125.000.000,00		137.500.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	13	110.000.000,00	19	125.000.000,00	25	137.500.000,00	31	160.000.000,00	37	200.000.000,00		
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				110.000.000,00		125.000.000,00		137.500.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	13	110.000.000,00	19	125.000.000,00	25	137.500.000,00	31	160.000.000,00	37	200.000.000,00		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				325.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraangender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	33,33	66,66	325.000.000,00	66,66	350.000.000,00	100	375.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	54	25.000.000,00	54	30.000.000,00	54	35.000.000,00	54	40.000.000,00	54	50.000.000,00		
2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	54	25.000.000,00	54	30.000.000,00	54	35.000.000,00	54	40.000.000,00	54	50.000.000,00		
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		320.000.000,00		340.000.000,00		360.000.000,00		400.000.000,00		

Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	-	5	300.000.000,00	5	320.000.000,00	5	340.000.000,00	5	360.000.000,00	5	400.000.000,00		
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				300.000.000,00		320.000.000,00		340.000.000,00		360.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	-	5	300.000.000,00	5	320.000.000,00	5	340.000.000,00	5	360.000.000,00	5	400.000.000,00		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM E / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara kompherensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	66,24	68,92	150.000.000,00	70,29	175.000.000,00	71,70	200.000.000,00	73,13	225.000.000,00	74,60	250.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	50	150.000.000,00	50	175.000.000,00	50	200.000.000,00	50	225.000.000,00	50	250.000.000,00		
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	-	1		1		1		1		1			

	Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)													
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	50	50.000.000,00	50	60.000.000,00	50	70.000.000,00	50	80.000.000,00	50	90.000.000,00		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	1	100.000.000,00	1	115.000.000,00	1	130.000.000,00	1	145.000.000,00	1	160.000.000,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	43,10	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	79,17	82,37		84,02		85,70		87,41		89,16			
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			

	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	60	500.000.000,00	60	500.000.000,00	60	500.000.000,00	60	500.000.000,00	60	500.000.000,00		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	60		60		60		60		60			

	(Orang)													
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	60		60		60		60		60			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00		
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	60	400.000.000,00	60	400.000.000,00	60	400.000.000,00	60	400.000.000,00	60	400.000.000,00		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.304.958.000,00		10.429.958.000,00		10.604.958.000,00		10.694.958.000,00		10.779.958.000,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	14,71	14.3090-14.3090	150.000.000,00	14.1119-14.1119	175.000.000,00	13.9156-13.9156	200.000.000,00	13.7198-13.7198	225.000.000,00	13.5248-13.5248	250.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	

2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				50.000.000,00		65.000.000,00		80.000.000,00		95.000.000,00		110.000.000,00	Perlindungan Anak	
Meningkatnya Pemahaman Pendidik Tingkat SLTP terhadap Kebijakan Pembangunan Kependudukan	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	20	26	50.000.000,00	26	65.000.000,00	26	80.000.000,00	26	95.000.000,00	26	110.000.000,00		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				50.000.000,00		65.000.000,00		80.000.000,00		95.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	20	26	50.000.000,00	26	65.000.000,00	26	80.000.000,00	26	95.000.000,00	26	110.000.000,00		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Meningkatnya Perkembangan Data Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	12	140.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	-	4		4		4		4		4			
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	-	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00		

Sistem Informasi Keluarga	Sistem Informasi Keluarga (Laporan)													
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				3.006.658.000,00		3.081.658.000,00		3.106.658.000,00		3.146.658.000,00		3.156.658.000,00		
Meningkatnya Jumlah Akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	81,89	76,33	692.000.000,00	76,38	767.000.000,00	76,44	792.000.000,00	76,49	832.000.000,00	76,55	842.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi (%)	90,41	89,47		89,48		89,49		89,50		89,51			
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				692.000.000,00		767.000.000,00		792.000.000,00		832.000.000,00		842.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Terhadap Akseptor KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	692.000.000,00	1	767.000.000,00	1	792.000.000,00	1	832.000.000,00	1	842.000.000,00		
	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	52	52		52		52		52		52			
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	47	44		46		46		47		47			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3.348	484		535		588		646		710			
	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	52	104		130		156		182		208			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	47	44	64.000.000,00	46	64.000.000,00	46	64.000.000,00	47	64.000.000,00	47	64.000.000,00		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				245.600.000,00		320.600.000,00		345.600.000,00		385.600.000,00		395.600.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3.348	484	245.600.000,00	535	320.600.000,00	588	345.600.000,00	646	385.600.000,00	710	395.600.000,00		

2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria				141.200.000,00		141.200.000,00		141.200.000,00		141.200.000,00		141.200.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	52	52	141.200.000,00	52	141.200.000,00	52	141.200.000,00	52	141.200.000,00	52	141.200.000,00		
2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				141.200.000,00		141.200.000,00		141.200.000,00		141.200.000,00		141.200.000,00		
Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	52	104	141.200.000,00	130	141.200.000,00	156	141.200.000,00	182	141.200.000,00	208	141.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8,69	8,9829	2.314.658.000,00	8,9787	2.314.658.000,00	8,9750	2.314.658.000,00	8,9722	2.314.658.000,00	8,9703	2.314.658.000,00		
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	7,22	7,94		8,30		8,66		9,02		9,38			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				303.600.000,00		303.600.000,00		303.600.000,00		303.600.000,00		303.600.000,00		
Meningkatnya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1	303.600.000,00	1	303.600.000,00	1	303.600.000,00	1	303.600.000,00	1	303.600.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				53.600.000,00		53.600.000,00		53.600.000,00		53.600.000,00		53.600.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1	1	53.600.000,00	1	53.600.000,00	1	53.600.000,00	1	53.600.000,00	1	53.600.000,00		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Lini Lapangan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	1	1	1.900.000.000,00	1	1.900.000.000,00	1	1.900.000.000,00	1	1.900.000.000,00	1	1.900.000.000,00		
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	346	2.430		2.430		2.430		2.430		2.430			
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM E / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	346	2.430	400.000.000,00	2.430	400.000.000,00	2.430	400.000.000,00	2.430	400.000.000,00	2.430	400.000.000,00		
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	1	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	4	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		

2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				111.058.000,00		111.058.000,00		111.058.000,00		111.058.000,00		111.058.000,00		
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	-	277	111.058.000,0 0	277	111.058.000,0 0	277	111.058.000,0 0	277	111.058.000,0 0	277	111.058.000,0 0		
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	277	277		277		277		277		277			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	-	277	100.000.000,00	277	100.000.000,00	277	100.000.000,00	277	100.000.000,00	277	100.000.000,00		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				11.058.000,00		11.058.000,00		11.058.000,00		11.058.000,00		11.058.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	277	277	11.058.000,00	277	11.058.000,00	277	11.058.000,00	277	11.058.000,00	277	11.058.000,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				7.148.300.000,00		7.173.300.000,00		7.298.300.000,00		7.323.300.000,00		7.373.300.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	73,43	75,01	7.148.300.000,00	76,32	7.173.300.000,00	77,63	7.298.300.000,00	78,94	7.323.300.000,00	80,25	7.373.300.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				820.000.000,00		820.000.000,00		920.000.000,00		945.000.000,00		970.000.000,00		
Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	-	26	820.000.000,00	26	820.000.000,00	26	920.000.000,00	26	945.000.000,00	26	970.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	-	26		26		26		26		26			
	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	26	10		15		22		33		49			
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	446	150		150		180		180		180			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	30	33		36		40		44		49			
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	-	26	50.000.000,00	26	50.000.000,00	26	50.000.000,00	26	50.000.000,00	26	50.000.000,00		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	30	33	300.000.000,00	36	300.000.000,00	40	300.000.000,00	44	300.000.000,00	49	300.000.000,00		
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	446	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	180	175.000.000,00	180	175.000.000,00	180	175.000.000,00		

2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				120.000.000,00		120.000.000,00		145.000.000,00		170.000.000,00		195.000.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	26	10	120.000.000,00	15	120.000.000,00	22	145.000.000,00	33	170.000.000,00	49	195.000.000,00		
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	-	26	50.000.000,00	26	50.000.000,00	26	75.000.000,00	26	75.000.000,00	26	75.000.000,00		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				6.328.300.000,00		6.353.300.000,00		6.378.300.000,00		6.378.300.000,00		6.403.300.000,00		

dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	26	26	6.328.300.000,00	26	6.353.300.000,00	26	6.378.300.000,00	26	6.378.300.000,00	26	6.403.300.000,00		
	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	26	26		26		26		26		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				417.500.000,00		417.500.000,00		417.500.000,00		417.500.000,00		417.500.000,00		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	26	26	417.500.000,00	26	417.500.000,00	26	417.500.000,00	26	417.500.000,00	26	417.500.000,00		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				5.860.800.000,00		5.860.800.000,00		5.860.800.000,00		5.860.800.000,00		5.860.800.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	26	26	5.860.800.000,00	26	5.860.800.000,00	26	5.860.800.000,00	26	5.860.800.000,00	26	5.860.800.000,00		
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	-	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00		

TABEL 4.3
DAFTAR SUB KEGIATAN DALAM Mendukung PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.14.2.08.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.08.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
			2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
			2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
3.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
4.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraangender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
5.	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
6.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara kompherensif	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
7.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
			2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
8.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
			2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
9.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
			2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya Jumlah Akseptor KB	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria	
			2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
10.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
			2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	

4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolak ukur keberhasilan utama dari suatu Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, yang berkontribusi langsung terhadap capaian visi dan misi kepala daerah. IKU menggambarkan *outcome* yang menunjukkan seberapa jauh program dan kegiatan perangkat daerah berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam konteks Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029, indikator kinerja utama yang digunakan adalah

1. Total Fertility Rate (TFR),
TFR merupakan indikator demografi yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun)
2. Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE),
APE merupakan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada pemerintah kabupaten/kota yang berkomitmen dan berprestasi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
3. Nilai Dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),
KLA merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk Memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi demi mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak.
4. Zona Integritas Perangkat Daerah,
ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Yang berlaku mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dan telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.4
IINDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
DINAS PPKBP3A

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	2,0300	2,0252	2,0242	2,0232	2,0222	2,0221	2,0191	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	-	630	660	690	730	760	790	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	-	750	800	820	840	860	880	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	78,78	79,48	80,18	80,88	81,58	82,28	82,98	Penunjang Urusan

4.4 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Renstra maupun Renja Perangkat Daerah yang menjembatani antara *output* program/kegiatan dengan *outcome* bertujuan untuk memantau dan mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis perangkat daerah.

IKK yang telah ditetapkan digunakan untuk penyelenggaraan urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030, dan telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PPKBP3A

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Negatif	Indeks	0,217	0,45 - 0,44	0,43 - 0,42	0,42 - 0,41	0,41 - 0,40	0,40 - 0,39	0,39 - 0,38	
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Positif	Indeks	96,22	96,56	96,78	97,01	97,23	97,46	97,69	
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Positif	Persentase	41,34	49,48	57,62	65,76	73,90	82,04	90,18	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Positif	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Positif	Persentase	43,10	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Positif	Indeks	60,83	65,29	67,29	69,29	71,29	73,29	75,29	
8	Total Fertility Rate (TFR)	Negatif	Orang	2,0300	2,0252	2,0242	2,0232	2,0222	2,0221	2,0191	
9	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Negatif	Kelahiran	14,7156	14,5069	14,3090	14,1119	13,9156	13,7198	13,5248	
10	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Positif	Persentase	81,89	76,27	76,33	76,38	76,44	76,49	76,55	

11	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Negatif	Persentase	8,6900	8,9833	8,9829	8,9787	8,9750	8,9722	8,9703	
----	---	---------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025– 2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Guna kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, Indikator kinerja dan target kinerja yang telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang ini, maka diharapkan Aparatur Sipil Negara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai komitmen untuk keberhasilan pencapaian target serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke depan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD Tahun 2025-2029 mendukung misi lima yaitu “Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial.” dengan tujuan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial dengan sasaran Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.3. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan substansi Renstra, dapat disimpulkan bahwa dokumen ini menjadi pedoman kebijakan dan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama periode 2025–2029. Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada konsistensi

pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan kerja yang kokoh dan adaptif, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian Visi: Sumedang Simpati Semakin Maju menuju Indonesia Emas 2045.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DONY AHMAD MUNIR



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002